

Bank-bank Indonesia dinilai dalam Laporan Perbankan Berkelanjutan ASEAN



Pada tanggal 6 September 2018 lalu, WWF mempublikasikan laporan Perbankan Berkelanjutan ASEAN yang menilai tingkat pengungkapan publik terhadap aspek Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*) dan integrasi Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (LST) yang mengacu pada kerangka kerja internasional dan nasional. Laporan ini menjadi tolak ukur kemajuan integrasi LST bank-bank di ASEAN dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan.

Laporan ini adalah versi pembaruan dari Laporan WWF tahun 2017 hasil kerjasama dengan National University of Singapore (NUS), Sekolah Bisnis untuk Tata Kelola, Lembaga dan Organisasi. Laporan ini menyandingkan informasi dari 34 bank di enam negara ASEAN terhadap indikator tata kelola perusahaan yang sehat dan pilar-pilar integrasi LST yang kuat. Adapun bank Indonesia yang dinilai adalah Bank Central Asia, Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Panin, Bank Permata, Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Victoria.

Empat bank anggota IKBI, yakni BCA, Bank Mandiri, BNI, dan BRI, telah menunjukkan kepemimpinannya melalui perbaikan kebijakan dan prosedur Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (LST). Sebagai contoh, BNI dan BRI telah mengungkapkan resume kebijakan pembiayaan sawit dan BNI telah membangun struktur organisasi yang mengakomodir fungsi dan tugas keuangan berkelanjutan.

Melalui laporan ini, terlihat bahwa bank memainkan peran penting dalam pembiayaan fase transisi, khususnya dalam sistem pangan, energi dan sistem transportasi yang berkelanjutan; dan bank harus menjadi bagian dari solusi pada fase transisi tersebut. Investor yang bertanggung jawab, sebagai pengurus modal, juga perlu memastikan bahwa bank-bank dalam portofolio mereka pun membuat kemajuan tepat waktu dalam hal ini, dan terlibat secara aktif untuk mendukung transisi yang dimaksud.

Focus Group Discussion “Inovasi Pendanaan Energi Terbarukan”

Institute for Essential Services Reform (IESR) mengadakan focus group discussion mengenai “Inovasi Pendanaan Energi Terbarukan” di Double Tree Hotel Cikini yang dihadiri pihak-pihak terkait.

Focus Group Discussion “Inovasi Pendanaan Energy Terbarukan” yang diadakan pada tanggal 28 September 2018 oleh Institute for Essential Services Reform (IESR) bekerja sama dengan proyek yang didukung oleh Kementerian Lingkungan Hidup Jerman (BMU) melalui GIZ ini bertujuan untuk mengidentifikasi instrumen dan model pendanaan untuk pembiayaan proyek energi terbarukan di Indonesia, menguji skema dana penjaminan untuk energi terbarukan, dan merumuskan rekomendasi kebijakan instrumen kebijakan publik dan regulasi perbankan yang sesuai untuk memobilisasi pendanaan proyek energi terbarukan.

Kajian yang dilakukan IESR (2018) tentang pengalaman tiga negara (India, China dan Jerman) mengembangkan energi bersih, memberikan kesimpulan bahwa dukungan pendanaan dan pembiayaan proyek energi terbarukan, terutama di masa awal penetrasi teknologi ke pasar domestik menjadi salah satu faktor kesuksesan. Ketersediaan instrumen pembiayaan dan instrumen mitigasi risiko yang tepat menjadi *policy levers* yang kemudian dapat memobilisasi pendanaan dari Lembaga pendanaan domestik dan internasional. Selain itu, Kajian yang dilakukan GIZ (2018) tentang Skema Dana Penjaminan untuk mendukung pengembangan energi terbarukan di Indonesia, menyampaikan analisis terhadap tantangan pembangunan energi terbarukan di Indonesia berikut model-model skema penjaminan yang diimplementasikan di berbagai negara (Prancis, Singapura, Thailand, dll) serta kerangka umum *guarantee fund* dan opsi kelembagaannya untuk mendukung pengembangan energi terbarukan di Indonesia.

Acara ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan kunci seperti pimpinan institusi jasa keuangan (bank dan non-bank) tingkat senior, anggota IKBI, pimpinan perusahaan pengembang energi terbarukan, pakar pembiayaan dan perbankan, dan instansi kementerian/lembaga yang relevan.

